



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
**UNIT KERJA** : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ANDI BUYUNG SAPUTRA**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **672653**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 452 m<sup>2</sup>/253 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1160 m<sup>2</sup>/1160 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m<sup>2</sup>/15 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HIBAH TANPA AKTA Rp. 900.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m<sup>2</sup>/15 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BULUKUMBA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 192.500.000

1. MOBIL, HONDA MPV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2DP-R A/T / SOLO/ NMAX 155 CC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 12.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 112.100.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 2.167.100.000

**III. HUTANG** Rp. 6.500.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.160.600.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.